



Yayasan
Masyarakat dan Perikanan
Indonesia



LAPORAN PELAKSANAAN PERTEMUAN REGULER

KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN (KBPB) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

Hotel Kristal - Kupang, 2 Mei 2024

Daftar Isi

Pendahuluan	2
Pelaksanaan Kegiatan.....	2
Peserta.....	2
Hasil Pertemuan.....	2
Rekomendasi.....	8
Rencana Kerja.....	9
Dokumentasi.....	16

Pendahuluan

Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Pelaksanaan Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna Provinsi NTT yang dilakukan sesuai keputusan Gubernur NTT nomor: 167/KEP/HK/2023 tentang Komite Pengelola Bersama Perikanan Provinsi NTT. Pertemuan Reguler kali ini membahas tentang pentingnya pengelolaan bersama perikanan, gambaran umum mitra di daerah, serta update dan evaluasi rencana kerja bersama periode 2023-2025 KPBP NTT yang merupakan sinergitas program pemerintah dan mitra (LSM, Akademisi dan Industri) di Provinsi NTT.

Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan Regular Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan pada hari Kamis, 2 Mei 2024 bertempat di Hotel Kristal Kupang. Kegiatan ini dilaksanakan secara Hybrid. Kumpulan seluruh dokumen kegiatan dapat diakses melalui link berikut; <https://bit.ly/KPBPProvNTT2024>

Peserta

Pertemuan Regular Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 diikuti oleh 67 orang peserta (53 luring dan 14 daring), yang terdiri dari 20 orang Perempuan dan 47 Laki-laki). Peserta berasal dari berbagai unsur seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Industri/pengusaha, Nelayan, dan LSM.

Hasil Pertemuan

Activity	Content
Yunita Mardiani, Operations Lead MDPI Pengantar Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Produksi bukan lagi menjadi hal utama, melainkan kualitas. Menjaga kualitas ikan, merupakan salah satu upaya dalam mendukung keberlanjutan SDI. Selain Kualitas, mekanisme sertifikasi ekolabel produk perikanan juga harapannya dapat meningkatkan nilai produk, dan menjadi bukti bahwa produk tersebut merupakan produk yang diperoleh secara berkelanjutan• Ketelusuran produk perikanan. Ketelusuran merupakan salah satu syarat permintaan pasar global Hal ini juga bertujuan untuk mencegah produk ilegal masuk ke negara luar.• Legal, terlapor, dan diatur (<i>Legal, Reported and regulated</i>) sangat penting dalam mendukung data yang berkualitas untuk pengelolaan perikanan. Isu saat ini, masih banyak nelayan yang belum mencatat secara mandiri hasil tangkapannya, begitu juga

	<p>kapal perikanan dan rumpon yang belum terdaftar. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, karena merupakan syarat untuk dapat ditelusuri adalah produk berasal dari sumber yang legal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan KPBP Provinsi NTT dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga saat ini (9 tahun). Mulai tahun 2024, Pertemuan regular dilaksanakan 1 kali. Kedepan perlu ada mekanisme kontribusi pembiayaan/pelaksanaan kegiatan baik cash/in-kind dari peserta
<p>Sulatri H. Rasyid, M.Si. Kepala DKP Prov. NTT</p> <p>Sambutan dan Pembukaan Kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah banyak proses yang dijalani dalam KPBP ini semoga akan lebih baik kedepannya untuk pengelolaan perikanan • Komoditas Tuna merupakan komoditas unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur • Perlunya tindakan pengelolaan perikanan tuna secara berkelanjutan karena terindikasi bahwa stock mengalami penurunan • Sertifikat MSC merupakan ecolabel yang mempromosikan perikanan yang bertanggung jawab • Data yang tidak berkualitas, akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat, sedangkan data yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran
<p>Sulatri H. Rasyid, M.Si. Kepala DKP Prov. NTT</p> <p>Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tuna dalam Mendukung Kebangkitan Ekonomi NTT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan pengelolaan dalam perikanan tuna dibagi kedalam 4 aspek, ekologi, sosial, ekonomi, kelembagaan • Tantangan pengelolaan perikanan tuna: ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi, kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dalam mendukung aktivitas penangkapan, diversifikasi produk olahan berorientasi ekspor dan integrasi pengelolaan hulu-hilir • Regulasi perikanan tuna; PermenKP No 22 Tahun 2021, Kepmen KP No 121 Tahun 2021 • Regulasi yang mendukung pengelolaan perikanan tangkap di NTT; Peraturan Gubernur NTT No 29 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur NTT No 40 Tahun 2022 • Kolaborasi dalam pengelolaan perikanan tuna; LSM, masyarakat, pemerintah, media, akademisi dan pelaku usaha
<p>Ir. Agustinus Bulu Ketua KPBP Prov NTT</p> <p>Kebijakan Pengelolaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan utama bidang perikanan tangkap; sarana dan prasarana, BPAN, pelayanan perizinan pelayaran perikanan tangkap, pelayanan kepelabuhan, sehat nelayan, pendataan statistik, penangkapan terukur, kampung nelayan

<p>Perikanan Tangkap dan Perkembangan Penggunaan Aplikasi SIMKADA di Provinsi NTT</p>	<p>maju/kampung nelayan modern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asuransi mandiri, nelayan diminta untuk mengaktifkan asuransi mandiri, karena keterbatasan untuk membiayai seluruh nelayan. Namun NTT masih memiliki kuota untuk memfasilitasi nelayan mendapatkan BPJS • Pelayanan perizinan perikanan tangkap tetap dilayani di Bidang perikanan tangkap namun hanya untuk kapal dengan ijin daerah, untuk kapal diatas 12 mil harus migrasi ke pusat. Daerah diberi kewenangan untuk kapal-kapal dibawah 12 mil • Yang terkait SIMKADA; SIUP, SIPI dan SIKPI • Sudah boleh menggunakan aplikasi SIMKADA, sehingga di NTT tidak lagi mengeluarkan ijin manual. • Nelayan kecil dijamin boleh menangkap dimana saja • Pelayanan yang harus diurus di pelabuhan: SPB, SHTI, SKAI, dan Data Logbook • Sehat nelayan NTT dialokasikan 500 bidang • Kampung nelayan maju, lokasi kampung nelayan maju di NTT diusulkan di 22 kabupaten/kota
<p>Raymond BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>Diseminasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan sosial dan keselamatan kerja bagi sektor perikanan tangkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BPJS ada 2, kesehatan dan ketenagakerjaan, • BPJS kesehatan punya jaminan kesehatan nasional, melindungi semua warga indonesia dari umur 0 tahun • BPJS ketenagakerjaan memiliki 5 program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan • BPJS ketenagakerjaan yang dapat dimiliki oleh nelayan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, • Jaminan kecelakaan kerja adalah tenaga kerja dilindungi dari berangkat kerja, ditempat kerja sampai pulang kerumah. • Ada bantuan beasiswa program JKK diberikan kepada anak dari peserta BPJS ketenagakerjaan yang meninggal pada saat bekerja • Jaminan kematian, tanpa melihat penyebab kematian, santunan akan tetap diberikan kepada keluarga untuk meringankan beban keluarga • Urutan ahli waris: janda/duda yg ditinggalkan, anak kandung, orang tua, cucu, kakek/nenek, saudara kandung, mertua
<p>Diskusi Panel 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana mekanisme teman-teman di provinsi terkait UU sehingga provinsi mendapatkan benefit dari PIT • Anggaran PIT masih belum sesuai alokasi dana yang dikelola oleh pemerintah daerah

	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan pelayanan e-bkp, kapal penangkap tuna banyak jolor menggunakan layang-layang, wilayah penangkapan diatas 12 mil. Ijinnya dulu tdkp kemudian beralih ke e-bkp, dimana pelayanannya cukup lambat melalui aplikasi. Nelayan SDM rendah, akhirnya jadi bulan-bulanan dari aparat. Sebaiknya ada porsi dari cabang Dinas, untuk mempercepat proses pendaftaran e-BKP untuk mempercepat prosesnya • PNBPN setiap hari harus lapor, karena sudah ada aplikasi yang cukup bagus dan setor langsung ke rekening PNBPN • PIT, ada kapal mau migrasi, tapi tidak ada petugas di amagarapati. Tidak ada petugas pusat dilapangan untuk memeriksa. • Kawasan konservasi, nelayan yang menangkap di kawasan tersebut, apa ijinnya? Karena sudah tidak ada TDKP. • Akan dicoba komunikasikan untuk cabang dinas bisa ambil alih untuk penerbitan e-bkp • Petugas PIT, petugas migrasi dan petugas yang mencatat ada sendiri. Jika memang ada kebutuhan petugas lapangan di kawasan flores timur akan coba diajukan. • BPJS sudah melakukan sosialisasi kepada nelayan dan sudah terbukti proses klaim cepat. BPJS TK siap membantu untuk nelayan yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke Kantor DKP Prov NTT • Kampung nelayan maju, AP2HI memiliki rencana untuk membentuk KUB. Khusus untuk kampung nelayan modern dikelola oleh direktorat jenderal perikanan tangkap khusus direktur jenderal kapal perikanan. Fasilitas yang diberikan biasanya dalam bentuk uang cash setelah menandatangani MoU. Awal pencairan adalah 60% dan sisanya akan dilakukan periode kedua. Namun saat ini sedang ada kendala dengan konsultan yang menangani • Kalau bisa dari pihak Provinsi untuk memfasilitasi jika ada investor atau pengusaha yang ingin membeli ikan di Oeba dan disediakan cold storage juga untuk menyimpan ikan
Panel 2	
Amrollah MDPI Kegiatan MDPI dalam	<p>Berbagai aktifitas MDPI sebagai bagian dari kontribusi pengelolaan perikanan di Provinsi NTT;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengumpulan data perikanan (data collection, implementasi teknologi, ETP awareness) dan dukungan validasi

<p>mendukung Pengelolaan Perikanan di Provinsi NTT</p>	<p>data statistik perikanan tangkap sebagai bagian dari peningkatan pengelolaan perikanan di NTT dan sertifikasi eko-label</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan peta untuk nelayan dalam mendukung efektifitas melaut dan menghindari IUUF (melaut di Timor Leste/perbatasan Australia) • Penguatan kelembagaan stakeholder melalui Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi NTT • Menyediakan sarana magang bagi Mahasiswa dan berbagi pengalaman dengan memberikan kuliah umum untuk mahasiswa perikanan • Peningkatan sosialisasi perizinan, pendaftaran dan penandaan kapal perikanan bagi pemangku kepentingan di NTT • Peningkatan kapasitas nelayan terkait Kecakapan Penanganan Ikan (SKPI) dan kecakapan nelayan (SKN) • Awareness rising kepada pemuda dan stakeholder terkait pentingnya sustainability melalui perayaan Hari Perikanan Nasional • Identifikasi Rumpon <p>Beberapa rangkuman data sampling perikanan tuna yang dilakukan di PPI Oeba;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis tuna yang dominan tertangkap di tahun 2022-2023 adalah jenis cakalang dan tuna sirip kuning. • Data tahun 2021-2023 menunjukkan ukuran tuna sirip kuning tertangkap belum dewasa (<100 cm) 78,96% dan dewasa 21,04%. Jenis Albakor 100% tertangkap ukuran dewasa (>80cm) dan tuna Mata besar yang tertangkap ukuran dewasa (>100cm) 3,58% dan belum dewasa 96,42% • Wilayah tangkap teridentifikasi keseluruhan berada di WPP 573 <p>Beberapa tantangan pelaksanaan kegiatan di lapangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpisahnya lokasi tuna besar dan kecil saat pembongkaran menyulitkan petugas melakukan sampling data secara komprehensif • Legalitas rumpon masih belum menjadi perhatian pelaku usaha/nelayan, sehingga belum ada yang berizin
<p>Andini PT. Sahabat Laut Lestari Penguatan Pengumpulan data Perikanan Gurita</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan hasil tangkapan dilakukan berbasis elektronik dengan perahu data • Dalam pencatatan selama 1 tahun, terlihat dari data puncak tertinggi hasil tangkapan berada pada bulan Mei dan November • Adapun rencana kerja tahun 2024 yaitu; pembentukan kelompok nelayan, Menjalin Kerjasama dengan mitra lainnya (mis; Tananua) untuk pengelolaan perikanan gurita, peningkatan kapasitas nelayan dan terlibat dalam penyusunan RPP gurita • Tantangan yang di hadapi terkait perikanan gurita; Sulit untuk mengidentifikasi gurita ketika berada dalam satu coolbox, sulit

	mendapatkan data tangkapansampingan jika pengumpulan data dilakukan ditempat supplier dan permintaan pasar global terkait gurita yang tersertifikasi masih kurang
<p>Muhammad Saleh Goro, S.Pi., M.Pi. Kepala CDKP Wilayah kabupaten Alor</p> <p>Kemitraan dan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi Menuju Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan target pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di Provinsi NTT (2023-2025) yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan melalui kolaborasi dan kemitraan antar Pemerintah dengan pemangku kepentingan dan Stakeholder terkait untuk penguatan tata kelola kelembagaan, perlindungan sumberdaya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. • 90% wilayah perairan Alor merupakan kawasan konservasi • Adapun capaian dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu KKD di Provinsi NTT sebagai model dalam pengelolaan KKD di Indonesia dan Dunia (2027) • Adapun kemitraan yang dilakukan oleh KCD Wilkab Alor terkait penelitian, pendidikan dan pembinaan yaitu dengan Politeknik Pertanian Kupang, STKIP Muhammadiyah Kalabahi, Universitas Tribuana Kalabahi dan Yayasan Dola Koyakoya kalabahi Alor. • Beberapa waktu kedepan KCD alor akan berubah menjadi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya, dengan dasar Pergub NTT 103/2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. <p>Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi ini yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum selarasnya pemahaman mengenai kawasan konservasi, 2. SDM Pengelola dan Sarana Prasarana Pendukung Kawasan Konservasi, 3. Penurunan alokasi pendanaan Kawasan konservasi, 4. Konflik Pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya laut juga masih sering terjadi di dalam Kawasan <p>Belum Masuknya Kawasan Konservasi dalam Peta Laut Hidros</p>

Rekomendasi

Adapun rekomendasi hasil kesepakatan Bersama dari pertemuan ini adalah sebagai berikut;

1. Perlu adanya upaya sharing pembiayaan operasionalisasi KPBP Provinsi NTT, baik pertemuan regular, pelaksanaan rencana aksi, pertemuan tim kecil, dll. Hal ini sebagai upaya kontribusi dari stakeholder dalam mendukung pengelolaan Bersama perikanan di Provinsi NTT
2. Perlu ditindaklanjuti terkait kekosongan syahbandar di Kabupaten SIKKA, dikarenakan disana tidak ada Pelabuhan sehingga menyulitkan pelayanan
3. Peningkatan legalitas perikanan, seperti kapal, rumpon, dll.
4. Sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini untuk memperjelas terkait pembayaran pajak/retribusi dari fasilitas/ pelayanan daerah untuk Masyarakat
5. Kunjungan potensi perluasan aktifitas KPBP oleh MDPI di Alor akan dilakukan dalam waktu dekat

Rencana Kerja

Rencana Kerja Kelompok Tuna

No	Rekomendasi Rencana Kerja	Rencana aksi	Target	Pelaksana	Lokasi kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Keterangan/Status
1	Perizinan Rumpon,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran rumpon 2. Perizinan rumpon dari pemerintah dan pelaku usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rumpon di semua KCD 2. Rumpon mendapatkan SIPR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelayan, KCD/DKP Prov. NTT, KUPP/KSOP, MDPI dan AP2HI, YKAN 	- 7 Wilayah KCD KP Provinsi NTT	2023-2025	
2	Penguatan Pengumpulan data Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data beberapa Sampel kapal untuk di ambil data biologinya yang memiliki legalitas yang lengkap 2. Observer Deployment untuk kapal PL di Maumere dan Larantuka (AP2HI) 	Terkumpulnya data biologi dari beberapa kapal	<ol style="list-style-type: none"> 1. MDPI, AP2HI, YKAN, WWF, AKADEMISI UNKRIS, MUHAMMADIYAH 	SIKKA, LARANTUKA, KUPANG, ALOR,	2023-2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data sampling telah dan sedang berjalan 2. Penempatan Observer (AP2HI) selama 2023 di Maumere dan Larantuka sebanyak 5 trip 3. MDPI berproses dalam perluasan cakupan kerja di WPP 713 dan/atau 714. Untuk Alor Kabir, Kec Panta, di Kokar Desa Adang Kec Alor Barat Laut (Desa Adang, Desa Ampera, Desa Lewang) ada UPI yang
9	Pertemuan Reguler KPBP Provinsi NTT I tahun 2023, Kristal Hotel Kupang. Rabu, 12 Juli 2023						

							menangani Tuna).
3	Penerbitan Legalitas (ijin)	3. Untuk kebutuhan ijin kapal handline maumere dan Larantuka	1. Target pas Kecil dan TDKP Buku Kapal Perikanan	2. AP2HI, KSOP, KCD LARANTUKA, MDPI, YKAN	1. Sikka 2. Flores Timur 3. ALOR Kota Kupang	Bertahap mulai dari 2023	1. Usulan ada gerai semua nelayan kecil berupa pas kecil dan TDKP 4. Penerbitan Pas Kecil dan TDKP yang difasilitasi AP2HI selama 2023 telah terbit sebanyak 57 dokumen kapal (Pas Kecil & TDKP)
4	Peningkatan SDM dan Perlindungan Nelayan	Sosialisasi dan Pelatihan dan sertifikasi SKN, SKPI, CPIB dan Asuransi Nelayan	1. SKN 2. Sertifikat CPIB Kapal 3. Sertifikasi CPIB ABK Kapal 2. Kartu Asuransi Nelayan	Nelayan, KCD/DKP Prov. NTT, DKP Kab. Kupang, KUPP/KSOP, MDPI Penyuluh Perikanan dan AP2HI, YKAN, PPI.OEBA, PPI.TENAU	1. Sikka 2. Flores Timur 3. ALOR 4. Kota Kupang	2023-2025	1. SKN sudah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2023 di PPI Oeba. Kegiatan diikuti oleh 45 nelayan dari PPI Oeba dan PPP Tenau 2. Sertifikat SKPI sudah terbit difasilitasi oleh AP2HI di Larantuka pada nelayan PL sebanyak 58 orang 3. Sertifikat CPIB sudah terbit difasilitasi oleh AP2HI di Larantuka pada kapal PL

							sebanyak 35 kapal
5	Implementasi teknologi Ketertelusuran/Monitoring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan Vessel Tracking Device pada kapal-kapal HL 2. Penyediaan informasi kapal perikanan HL dan PL online melalui portal.ap2hi.org 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data alur penangkapan ikan nelayan HL untuk ketelusuran dan monitoring 2. Data kapal PL dan HL tersedia secara online dan dapat diakses terbuka oleh publik 	MDPI, AP2HI, YKAN, WWF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikka 2. Flores Timur 3. ALOR 4. Kota Kupang 	2023-2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikka sudah 2 Unit 2. Kupang sudah 1-unit PDS
	Penguatan akses pasar	Perluasan sertifikasi MSC 2 nd Tranche untuk menambahkan alat tangkap HL	Alat tangkap HL masuk dalam sertifikasi MSC Fishery 2 nd Tranche	AP2HI, MDPI, KKP, DKP Prov. NTT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maumere 2. Larantuka 	2023-2024	On proses Data sudah terkumpul dan status sedang di review oleh asesor dan rencana sertikat keluar di bulan Juni 2024
	Pelaksanaan aspek HAM dan Tanggungjawab sosial pada AKP dan nelayan	Penyadartahuan awak kapal perikanan/nelayan terkait aspek HAM dan tanggungjawab sosial	Meningkatkan komitmen dan pemahaman awak kapal perikanan/nelayan terkait aspek HAM dan Tanggungjawab sosial	AP2HI, MDPI, DKP Prov. NTT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maumere 2. Larantuka 3. Kupang 	2023-2024	Selama 2023, AP2HI telah melakukan sosialisasi dalam rangka penyadartahuan pada AKP dan nelayan terkait aspek HAM dan tanggungjawab sosial pada sebanyak 106 nelayan HL dan PL di NTT

Rencana Kerja Kelompok Gurita

No	Rekomendasi Rencana Kerja	Rencana aksi	Target	Pelaksana	Lokasi kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Keterangan/Status
1	Penguatan Pengumpulan data Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data port sampling di supplier - Mengumpulkan data produksi 	Terkumpulnya data biologi dari beberapa supplier dan data produksi dari logbook nelayan	SLL, Nelayan KCD Flotim DKP Kab Sikka	- Kab Sikka	2023-2025	Masih terus berjalan pendataan gurita di Desa Nangahale. Saat ini sudah ada ±5000 data sampel biologi
2	Perizinan / pendaftaran sampan tanpa mesin	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelurkan surat keterangan dari DKP Prov - Bersurat ke KSOP - Konsultasi dengan DKP Provinsi 	Keluarnya surat keterangan tanda sampan, baik dari DKP Prov, KSOP atau Kemenhub	SLL MDPI DKP Prov NTT KSOP	Kab Sikka	2023-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terlaksana di Kab Sikka untuk Pas Kecil dan TDKP 2. Untuk sampan hanya Surat Keterangan
3	Registrasi/Kejelasan Alat Tangkap	Membuat profil alat tangkap gurita dan mencocokkan sesuai UU yang ada terkait konstruksi	Tersedianya profile alat tangkap gurita	SLL MDPI Perguruan Tinggi	Kab Sikka	2024	Sudah berdiskusi dengan level nasional dan disepakati bahwa alat tangkap gurita termasuk kedalam handline. Sedang dalam proses penyusunan profil alat tangkap khusus gurita
4	Peningkatan SDM dan Perlindungan Nelayan	Sosialisasi dan Pelatihan dan sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> - SKN, - CPIB (nelayan, kapal dan supplier) - Kusuka Korporasi 	<ul style="list-style-type: none"> - SKN, - CPIB (nelayan, kapal dan supplier) - Kusuka Korporasi 	Nelayan, KCD/DKP Prov. NTT, DKP Kab.Kupang, KUPP/KSOP, MDPI Penyuluh Perikanan	Kab Sikka	2023-2025	Pada bulan Oktober 2023 telah dilaksanakan Bimtek SKN dan dihadiri oleh 43 nelayan.

5	Konsultasi Tanggungjawab sosial nelayan	Penyadartahuan awak kapal perikanan/nelayan terkait aspek HAM dan tanggungjawab sosial	Meningkatkan komitmen dan pemahaman awak kapal perikanan/nelayan terkait aspek HAM dan Tanggung jawab sosial	SLL, DKP Prov. NTT	Kab Sikka	2023-2024	Telah dilakukan sosialisasi dengan nelayan terkait penyadartahuan awak kapal perikanan / nelayan terkait aspek HAM dan tanggung jawab sosial
6	Produk Olahan Turunan	Perluasan produk turunan dari Gurita memanfaatkan gurita reject yang kurang memiliki nilai	Tersedianya produk olahan turunan untuk gurita Tersedianya pasar menengah keatas untuk produk tersebut	SLL, Penyuluh Perikanan Perguruan Tinggi	Kab. Sikka	2023-2025	(belum terlaksana)

Rencana Kerja Kelompok Konservasi

No	Rekomendasi Rencana Kerja	Rencana aksi	Target	Pelaksana	Lokasi kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Keterangan/Status
1	Penguatan Kelembagaan	1. Rencana Zonasi dan Satuan Unit organisasi Pengelola (SUOP) 2. UPT menuju BLUD 3. Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi 4. Sosialisasi KK 5. Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Masyarakat 6. Monitoring dan Pendataan Biofisik target Konservasi dan Sosek 7. Pengawasan dan Pemantauan 8. EAFM di NTT 9. Review Kawasan konservasi di perairan wilayah Sikka Prov. NTT	1. Terbentuknya SUOP di Kawasan Konservasi (KK) Ende, Maubesi, Batu Gede 2. - Terbentuknya UPT Balai Pengelolaan KK - Terbentuknya BLUD di KK Daerah 3. Tersedianya dokumen Rencana Pengelolaan (RP) pada KKD 4. Tersosialisasinya KK melalui kegiatan KCD mengajar dan turun desa 5. - Pembangunan pusat informasi 6. Adanya data series tahunan 7. Patroli terpadu, pengawasan berbasis masyarakat dilakukan 1 kali/bulan 8. Restrukturisasi dan Pembentukan Pokmaswas	1. DKP, KCD, BPSPL 2. DKP NTT, KKP dan Kemendagri 3. SUOP KK Alor, FLOTIM, WWF, BPSPL Denpasar, Pemda/Pemkab, MDPI 4. SUOP, WWF, TAKA, TSI, Untrip, BKKPN Kupang 5. BNSP, SUOP, WWF, MDPI, KKP 6. SUOP, WWF, TAKA, TSI, MDPI, BKKPN Kupang, BPSPL Denpasar, BKSDA 7. SUOP, DKP, Pokmaswas, PSDKP, Pol PP, TNI AL, Airud 8. Team POKJA Review Kawasan konservasi	1. Ende, Maubesi, Batu Gede 2. 7 UPT - 2 BLUD 3. Alor dan Flotim, Lembata, Sikka 4. Alor, Flotim, Lembata, Sikka, Rotte, Kab Kupang, Sabu, Sumba Timur, dam Barat daya, Manggarai Barat 5. Idem 4 6. Idem 4 7. Idem 4	2023-2025	1. SUOP sudah terbentuk 2. Pembentukan KCD Alor menjadi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor (menunggu perda) 3. Nomor 3 sedang proses 4. Pengembangan pengelolaan perikanan di Kawasan konservasi/ Kawasan Strategis Nasional Tertentu (Tahun depan ada Perpres) 5. No 4 5, 6, 7, 8 Sudah 6. Untuk Perkembangan pusat informasi sudah terbangun di Alor, Flotim, Lembata. 7. Untuk nomor 8 terkait Restrukturisasi Pokmaswas sudah berjalan di 15 kelompok Poin 1-8 saat ini sedang berproses/dikelola Optimum, dan butuh penguatan Poin 6 yang dilakukan WWF; Pemantauan, Workshop dan Pelatihan Ekologi di Alor MPA di Bulan Juni 2023.
14			Pertemuan Reguler KPBP Provinsi NTT I tahun 2023, Kristal Hotel Kupang. Rabu, 12 Juli 2023				

2	EAFM di NTT	<ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan data perikanan (Biologi dan Sosek) Capacity Building 	<p>9. Peningkatan Skor EAFM dari tahun 2021</p>	<p>DKP NTT, WWF, LC EAFM, SLL.</p>	<p>1. Alor, Flotim, Lembata, Sikka, Rotte, Kab Kupang, Sabu, Sumba Timur, dan Barat daya, Manggarai Barat</p>	<p>2023-2025</p>	<p>• Telah dilakukan Pemantauan Sosial, Ekonomi, dan Persepsi masyarakat pada 1 – 20 Mei 2023 di 18 desa Alor MPA (14 desa di dalam MPA dan 4 desa di luar MPA/Kontrol). Workshop dan pelatihan di hadiri oleh KCD KP Prov. NTT, DKP Kab Alor, Satpol PP Kab Alor, Universitas Tribuana, Konsultan, Enumerator dan Yayasan WWF-Indonesia. Total Peserta adalah 18 orang (10 L dan 8P). Pengambilan data lapangan oleh 9 orang enumerator (4L dan 5P).</p>
---	-------------	---	---	------------------------------------	---	------------------	---

Dokumentasi

Gambar	Keterangan
	<p>Arahan dan pembukaan kegiatan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>
	<p>Penyerahan (simbolis) Sertifikat CPIB dan SKPI untuk nelayan dari Oeba</p>



Panel diskusi 1, Ketua KPBP (kiri), Kepala Bidang PSDKP DKP Prov. NTT (Tengah) dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kupang (Kanan)



Panel Diskusi II (kiri ke kanan)

Perwakilan MDPI, KCD Wilayah Alor, PP Tenau (Moderator), AP2HI dan PT. SLL